

Efektifitas Tugas Karyawan Bagian Kasi Pelayanan Kantor Desa Muara Tobek Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi

Rizki Agung Ramadhan

Universitas Islam Riau

Email: rizkiagungramadhan9@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 04, 2026

Revised January 14, 2026

Accepted January 23, 2026

Keywords:

Work Effectiveness, Public Service, Village Government, Service Section

ABSTRACT

This service is purposeful to analyze the effectiveness of employees' task performance in the Service Section (Kasi Pelayanan) at the Muara Tobek Village Office, Pucuk Rantau District, Kuantan Singingi Regency, and to identify the obstacles faced in carrying out these tasks. This devotion uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation during the internship period. The results show that the task performance of the Service Section at the Muara Tobek Village Office has generally been quite effective. This can be seen from the implementation of administrative services, population data collection, support for village development activities, distribution of social assistance, and preparation of activity reports. However, this effectiveness has not been fully optimal due to several obstacles, such as the limited number of human resources with adequate skills in government administration and limited supporting facilities and infrastructure, especially information technology. To overcome these obstacles, the village government applies a teamwork-based approach (gotong royong), flexible task distribution, and involves internship students as administrative support staff. These efforts help maintain the continuity of public services and improve the effectiveness of the Service Section's performance at the village level.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 04, 2026

Revised January 14, 2026

Accepted January 23, 2026

Keywords:

Efektivitas Kerja, Pelayanan Publik, Pemerintahan Desa, Kasi Pelayanan

ABSTRACT

Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan tugas karyawan pada bagian Kasi Pelayanan di Kantor Desa Muara Tobek, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan selama kegiatan magang berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Kasi Pelayanan di Kantor Desa Muara Tobek secara umum telah berjalan cukup efektif, ditandai dengan terlaksananya pelayanan administrasi, pendataan kependudukan, pendukung kegiatan pembangunan desa, serta penyaluran bantuan sosial dan penyusunan laporan kegiatan. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang administrasi pemerintahan serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, khususnya teknologi informasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah desa menerapkan strategi kerja berbasis gotong

royong, pembagian tugas yang fleksibel, serta melibatkan mahasiswa magang sebagai tenaga pendukung administratif. Upaya ini membantu menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas kinerja Kasi Pelayanan di tingkat desa.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Rizki Agung Ramadhan

Universitas Islam Riau

Email: rizkiagungramadhan9@gmail.com

PENDAHULUAN

Tulis pendahuluan dengan font times new r Pembentukan pemerintahan dalam suatu negara, termasuk Indonesia, pada dasarnya bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keteraturan masyarakat. Pemerintahan tidak hanya berfungsi sebagai pengendali sosial melalui regulasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Tujuan tersebut menjadi landasan utama terbentuknya sistem pemerintahan yang berjenjang dan terstruktur, sehingga pelaksanaan kekuasaan negara dapat berjalan secara efektif tanpa bersifat represif terhadap masyarakat (Syafi'i, 2011).

Sistem pemerintahan di Indonesia mengenal pembagian wilayah pemerintahan secara vertikal yang terdiri atas pemerintahan pusat, pemerintahan daerah tingkat provinsi, pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga pemerintahan desa. Dalam pemerintahan daerah, kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri dilegalkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk pemerintahan daerah yang memiliki peran strategis dalam pelayanan publik adalah pemerintahan desa. Secara historis, desa di Indonesia telah ada jauh sebelum terbentuknya negara modern. Wasistono (2006) menjelaskan bahwa keberadaan desa telah teridentifikasi sejak masa kolonial, ketika Herman Warner Muntinghe pada tahun 1811 menemukan komunitas masyarakat yang hidup secara mandiri di wilayah terpencil dengan pola interaksi sosial yang kuat. Desa tidak hanya dipahami sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki norma, adat istiadat, serta batas wilayah yang jelas (Maulida, 2015).

Salah satu perangkat desa yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan. Kasi Pemerintahan bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas operasional di bidang pemerintahan, termasuk pengelolaan administrasi pemerintahan, pelaksanaan anggaran, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, serta pengendalian kegiatan sesuai dengan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDes). Dengan kompleksitas tugas tersebut, efektivitas kinerja aparatur pada bagian Kasi Pemerintahan menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan magang dilaksanakan di Kantor Desa Muara Tobek, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Muara Tobek dipilih sebagai lokasi magang karena relatif jarang menjadi objek kegiatan magang mahasiswa, sehingga memberikan peluang untuk melakukan pengamatan langsung terhadap praktik pemerintahan desa secara lebih mendalam.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan tugas karyawan pada bagian Kasi Pemerintahan di Kantor Desa Muara Tobek, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian ilmu pemerintahan sekaligus menjadi bahan evaluasi praktis bagi peningkatan kinerja pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam efektivitas pelaksanaan tugas karyawan pada bagian Kasi Pelayanan di Kantor Desa Muara Tobek, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi. Pendekatan kualitatif dipilih karena pengabdian ini berfokus pada pemahaman proses kerja, peran aparatur desa, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik di tingkat desa berdasarkan kondisi empiris di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Muara Tobek merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, yang penyelenggaraannya pemerintahannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan Desa Muara Tobek menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dengan berlandaskan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini tercermin dalam perencanaan pembangunan desa melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang disusun untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

Secara struktural, Pemerintah Desa Muara Tobek terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. Struktur ini memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat desa.

Pembahasan

Alur kerja pemerintahan desa menunjukkan bahwa setiap program dan kegiatan desa diawali dengan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh perangkat desa sesuai bidang tugas masing-masing, termasuk Kasi Pemerintahan dan Kasi Pelayanan sebagai pelaksana teknis. Dalam pelaksanaannya, kegiatan

administratif seperti pengarsipan, pendataan, dan pelaporan menjadi bagian penting untuk mendukung akuntabilitas pemerintahan desa. Mahasiswa magang terlibat dalam proses ini sebagai pendukung administrasi dan dokumentasi kegiatan.

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Tugas Karyawan Bagian Kasi Pemerintahan di Kantor Desa Muara Tobek Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan konsep efektivitas yang dikemukakan oleh Dunn (2003), efektivitas suatu kegiatan dapat dilihat dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam konteks pemerintahan desa, efektivitas tugas Kasi Pelayanan dan Kasi Pemerintahan tercermin dari kemampuan perangkat desa dalam memberikan pelayanan administratif, melaksanakan kegiatan pembangunan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan secara tepat waktu dan sesuai prosedur.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar tugas pokok Kasi Pelayanan dan Kasi Pemerintahan telah dilaksanakan, seperti pengelolaan administrasi desa, pendataan kependudukan, serta pendukung kegiatan pembangunan dan penyaluran bantuan sosial. Keterlibatan mahasiswa magang membantu memperlancar pelaksanaan tugas-tugas tersebut, terutama dalam aspek administratif dan dokumentasi kegiatan.

a. Perbandingan dengan Standar Ideal

Secara ideal, perangkat desa yang menjalankan fungsi pelayanan publik seharusnya didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta sistem administrasi yang tertata dengan baik. Standar ideal ini sejalan dengan fungsi pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dan pemberdaya masyarakat (Ndraha, 2000).

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tugas di Kantor Desa Muara Tobek belum sepenuhnya memenuhi standar ideal tersebut. Beberapa kegiatan masih dilakukan secara manual dengan keterbatasan fasilitas, sehingga proses administrasi dan pelayanan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Meski demikian, perangkat desa tetap berupaya menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam praktik di lapangan, efektivitas tugas Kasi Pelayanan dan Kasi Pemerintahan cukup terlihat pada pelaksanaan program-program desa seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), program ketahanan pangan melalui penanaman jagung, pembangunan infrastruktur berupa pengerasan jalan desa, serta pengelolaan data kependudukan. Program-program tersebut dapat terlaksana dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat desa.

Mahasiswa magang berperan membantu proses verifikasi data penerima BLT, penginputan data kependudukan, serta penyusunan laporan kegiatan pembangunan. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa dukungan administratif sangat berpengaruh terhadap kelancaran tugas perangkat desa, khususnya pada bagian Kasi Pelayanan.

b. Kendala yang Ditemukan

Meskipun tugas-tugas Kasi Pelayanan dan Kasi Pemerintahan dapat dilaksanakan, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi tingkat efektivitasnya. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi administrasi pemerintahan. Sebagian besar perangkat desa merupakan

lulusan SMA, sehingga pemahaman terhadap administrasi pemerintahan modern masih perlu ditingkatkan.

Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti kurangnya rak arsip, belum tersedianya mesin fotokopi, keterbatasan jumlah komputer, serta tidak adanya jaringan internet (wifi). Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses administrasi dan pengelolaan data, terutama dalam era digitalisasi pemerintahan desa.

c. Solusi dan Strategi yang Diterapkan

Sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan tersebut, perangkat desa menerapkan strategi kerja berbasis gotong royong dan pembagian tugas yang fleksibel. Mahasiswa magang dilibatkan untuk membantu pengelolaan arsip, input data, dan dokumentasi kegiatan guna mengurangi beban kerja perangkat desa. Selain itu, koordinasi antarperangkat desa dilakukan secara intensif agar pelaksanaan tugas tetap berjalan meskipun dengan fasilitas yang terbatas.

Keterlibatan mahasiswa magang secara tidak langsung menjadi solusi sementara dalam meningkatkan efektivitas tugas Kasi Pelayanan dan Kasi Pemerintahan, khususnya dalam aspek administrasi dan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan sumber daya manusia tambahan dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintahan desa meskipun dalam kondisi keterbatasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas karyawan pada bagian Kasi Pelayanan di Kantor Desa Muara Tobek secara umum telah berjalan cukup efektif. Hal ini tercermin dari terlaksananya fungsi pelayanan administrasi, pendataan kependudukan, pendukung kegiatan pembangunan desa, serta keterlibatan dalam penyaluran bantuan sosial dan penyusunan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program-program desa yang dijalankan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa peran Kasi Pelayanan memiliki kontribusi penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik.

Namun, efektivitas pelaksanaan tugas Kasi Pelayanan belum sepenuhnya optimal apabila dibandingkan dengan standar ideal penyelenggaraan pemerintahan desa. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di bidang administrasi pemerintahan serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, khususnya fasilitas teknologi informasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah desa menerapkan strategi kerja berbasis gotong royong, pembagian tugas yang fleksibel, serta melibatkan mahasiswa magang sebagai tenaga pendukung administratif. Strategi ini membantu menjaga keberlangsungan pelayanan publik meskipun dalam kondisi keterbatasan, sekaligus menjadi upaya adaptif dalam meningkatkan efektivitas kinerja Kasi Pelayanan di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003).
- Dunn, W. N. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Madah University Press.
- Ndraha. (2011). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Daerah Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maulida. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafra.
- Syafi'i, I. K. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafiie. (2011). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju. Syaukani. (2002). *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Mida Pustaka.
- Wasistono. (2006). *Proses Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muslim, S. (2021). PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI LEGALITAS USAHA. "Geliat Investasi Dalam Pusaran Pandemi: Membaca Celah Pemulihan Ekonomi Nasional Di Era New Normal", 247.
- Brathakusuma, D. S. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sadad, A. (2014). *Organisasi Dan Manajemen (Pengaruh Pemotifasian Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai)*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Subekti, A., & Muhammd, J. (2013). *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- (2011). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju. Syaukani. (2002). *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Mida Pustaka.